

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno , 2001, *Korupsi dan Perbuatan Melawan Hukum*, CV Rizkita, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amrullah, Arief, 2003, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang.
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana; Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- _____, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- _____, 2016, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister Semarang, Semarang.
- Atmasasmita, Romli. 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*.Bandar maju, Bandung.

- _____. 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Prenadia Group, Jakarta.
- _____. 2016, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Kencana, Jakarta.
- Bemmelen, J.M. Van, 1984, *Hukum Pidana I : Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bina cipta, Bandung.
- BPHN, 2008, *Bunga Rampai Hukum Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Danil, H. Elwi, 2012, *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fajar, Mukti, Yulanto Ahmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Garner , Bryan A, 2007, *Black's Law Dictionary*, West ST. Paul: Deluxe Ninth Edition.
- Girsang, Juniver. 2012. *Abuse of Power Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia, Masalah, dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta
- _____. , 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. , 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang,
- Indriati, Etty. 2014. *Pola dan Akar Korupsi*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
- Istanto, Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Klitgaard, Robert. 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta

_____, 2006, *Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri (Deskripsi Singapura, Hongkong, Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya dan Tanzania)*, KPK, Jakarta.

_____, 2014, *Anotasi delik korupsi dan delik lainnya yang berkaitan dengan delik korupsi dalam RUU KUHP*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta

_____, 2016, *Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis*, KPK, Jakarta

Lamintang, P.A.F, C.Djisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hakdan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Nuansa Aulia, Bandung

Mardiasmo, 2011, *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

_____. 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Muladi, Diah Sulistyani, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, PT Alumni, Bandung.

Najih, Mokhammad , 2008, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, In-trans Publishing Malang, Malang,

Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Poerwadarminta, W.J.S., 1984, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi (Elemen Sistem Integritas Nasional)*, Tranparancy International Indonesia & Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Saleh, K. Wantjik, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Santosa, Prayitno Iman, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subagyo, Joko P., 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarif, Laode M., Didik E. Purwoleksono (editor), 2012, *Hukum Anti Korupsi*, USAID Kemitraan partnership The Asia Foundation, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2985;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 58, dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3178;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, dan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againsts Corruption*.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi tahun 2003 yaitu *United Nations Convention AgainstCorruption* (UNCAC)

United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention Against Corruption

Prenvetion of Corruption Act (Chapter 241), The Statutes of Republic of Singapore (UU Pencegahan Korupsi Singapura);

Dutch Criminal Code

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2018

Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2007-2010

C. Jurnal, dan Penulisan Hukum

Alfian Wahyu Pratama, “Kebijakan Hukum Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi”, *Jurnal NESTOR Magister Hukum Universitas Tanjungpura*, Volume 2, Nomor 2

Andreas Nathaniel Marbun, “Suap di Sektor Privat : Dapatkah Dijerat?”, *Jurnal Integritas*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Volume 03, Nomor 1, 2017.

Anggini, Amelia Dewi, 2015, “Penerapan Trading in Influence dalam UNCAC Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Tesis*, Magister Hukum Litigasi, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Anne van Aaken, Lars P. Feld, Stefan Voight, "Independent prosecutors deter political corruption? An empirical evaluation across seventy-eight countries", *American Law and Economic Review*, Volume 12, Nomor 1

Antonio Argandoña, 2003, “Private-to-private corruption”. *Journal of Business Ethics*, Vol. 47, No. 3, October, 2003.

Arnoud Willems, Michele Tagliaferri, Nikolaos Theodorakis, 2016, “Corruption Risk Assessment Tools in Customs and Trade”, *OECD Integrity Forum, Fighting The Hidden Tariff: Global Trade Without Corruption*, April, 2016.

David Chaikin, "Commercial corruption and money laundering: a preliminary analysis", *Journal of Financial Crime*, Vol. 15, Issue: 3, 2008.

Erwin, Olivia Oktari, 2017, “Kebijakan Formulasi Mengenai Illicit Enrichment Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Happy Febrina Hariyani, Dominicus Savio Priyarsono, Alla Asmara, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol 5 No 2, 2016

- Hin, Koh Teck, *Corruption Control in Singapore*, UNAFEI Resource Material Series No. 83, Tokyo Maret, 2011.
- Misbahul Anwar, 2018, “Kebijakan Hukum Pidana Terkait Penyuapan di Sektor Swasta diIndonesia”, Tesis, Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Jamin Ginting, “Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Volume 11, Nomor 3 , 2011
- Kerangka Acuan Seminar Sehari Sensitisasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), Stranas PPK dan Inpres No. 1 Tahun 2013 di Indonesia. Jakarta, 7 November 2013
- Lucinda A. Low Partner, Steptoe & Johnson LLP, “The United Nations Convention Against Corruption: The Globalization of Anticorruption Standards”. *Conference of The International Bar Association International Chamber of Commerce Organization for Economic Cooperation and Development. “The Awakening Giant of Anticorruption Enforcement”*, London, England 4-5, May, 2006.
- Mari-Liis Sööt et.all, “Private-to-private corruption:Taking business managers’ riskassessmentseriously when choosing anti-corruption”, *Makalah, OECD Integrity Forum, Fighting The Hidden Tariff: Global Trade Without Corruption*, 19-26 April , Paris, Perancis, 2016.
- Mark F Mendelshon et.al, “The Anti Bribery and Anti Corruption Review”, London, United Kingdom, November ,2014.
- Phillipa Webb, “United Nation Convention Against Corruption Global Achievement or Missed Opportunity?”, *Jurnal of International Economic Law*, Vol. 8 No. 1, 2005
- Philipus M. Hadjon, “Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo)”, *Makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, , 18 Juni 2008.
- Reza Fikri Febriansyah, “Bijaksana Menyikapi RUU Tipikor”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 2, Juni, 2011
- Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, Nomor 1 Vol.16 Januari , 2009.

Vidya Prahassacita, “Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyusunan di sektor privat dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan dibandingkan dengan Singapura, Malaysia dan Korea Selatan”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 4, 2017.

W. Paati Ofosu-Amaah, et all, “Combating Corruption : A Comparative Review of Selected legal Aspects of State Practice and Major Internasional Initiatives”, *World Bank*, Washington D.C., Amerika Serikat, 1999

Wignjosoebroto, Soetandyo, “Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam *Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Juli, 1993.

D. Internet

Adnan Topan Husodo, “Korupsi sektor swasta” ,
<http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-sektor-swasta>, diakses tanggal 26 Mei 2017

Agus Sahbani, “Begini Prosedur Penanganan Pidana Korporasi”, diakses dari
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-pidana-korporasi>, diakses tanggal 27 Mei 2017

Andi Saputra, “Kasus Bioremediasi Chevron, MA Vonis Bebas Ricksy dan Herland”,
<https://news.detik.com/berita/d-3320637/kasus-bioremediasi-chevron-ma-vonis-bebas-ricksy-dan-herland> diakses tanggal 29 Oktober 2017

Ant, “Statistik KPK: Pelaku Korupsi Terbanyak dari Swasta, Disusul Pejabat dan Anggota DPR”,
<https://news.okezone.com/read/2017/10/05/337/1789432/statistik-kpk-pelaku-korupsi-terbanyak-dari-swasta-disusul-pejabat-dan-anggota-dpr> diakses dari tanggal 8 November 2017

Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus Cambridge University Press, 2019, “Definition of “the public sector””,
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/public-sector> diakses tanggal 14 Januari 2019

Dani Prabowo, “Wakil Ketua KPK: Sektor Swasta Paling Banyak Terlibat Kasus Korupsi”,
<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/21/15574231/wakil.ketua.kpk.sektor.swasta.paling.banyak.terlibat.kasus.korupsi>, diakses tanggal 26 Mei 2017

- Dylan Aprialdo Rachman, 2018, “Cerita Pimpinan KPK tentang Korupsi 10 Dollar di Singapura”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/27/13334431/cerita-pimpinan-kpk-tentang-korupsi-10-dollar-di-singapura> diakses tanggal 27 Januari 2018
- Eddy O.S Hiariej, "Quo Vadis" RUU Tipikor?", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2011/04/07/04360667/quotquo.vadisquot.ruu.tipikor>, diakses tanggal 25 Desember 2018
- Erry Riyana Hardjapamekas, “Tantangan Governansi Dalam Menyelesaikan Masalah Korupsi Di Sektor Publik & Sektor Swasta”, <https://acch.kpk.go.id/id/ragam/makalah/tantangan-governansi-dalam-menyelesaikan-masalah-korupsi-di-sektor-publik-sektor-swasta>, diakses tanggal 26 Mei 2017
- Herriet Kemp, “The cost of corruption is a serious challenge for companies”, <https://www.theguardian.com/sustainable-business/corruption-bribery-cost-serious-challenge-business> diakses tanggal 3 Agustus 2017
- Hukumonline, “Lika-Liku Menarik Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Korupsi”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5885f5667b8a1/likaliku-menarik-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-kasus-korupsi>, diakses tanggal 26 Mei 2017
- Hukumonline, 2013, “Ini Korporasi Pertama yang Dijerat UU Tipikor” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50feae76da8bf/ini-korporasi-pertama-yang-dijerat-uu-tipikor> diakses tanggal 24 Desember 2017
- ICJR, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP “, <http://icjr.or.id/pertanggungjawaban-korporasi-dalam-rancangan-kuhp/>, diakses tanggal 27 Mei 2017
- ICW, “Kerugian Negara Akibat Korupsi 2015 sebesar 31 Triliun, <http://www.antikorupsi.org/id/content/kerugian-negara-akibat-korupsi-2015-sebesar-31-triliun>, diakses tanggal 26 Mei 2017
- Iron Sarira, “Tindak pidana penggelapan Di Perusahaan Swasta dan Lembaga Pemerintah”, <http://business-law.binus.ac.id/2015/09/19/administrative-penalty-dalam-hubungan-ketenagakerjaan/> diakses tanggal 15 Januari 2019

- Jamin Ginting, “Korupsi Sektor Swasta”, <http://nasional.kompas.com/read/2012/02/09/03193438/korupsi.sektor.swasta>, diakses tanggal 27 Mei 2017
- KPK, “Upaya KPK Menangani Korupsi Di Sektor Swasta”, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=166:upaya-kpk-menangani-korupsi-di-sektor-swasta>, diakses tanggal 27 Mei 2017
- KPMG, “Survey on Bribery and Corruption Impact on Economy and Business Environment”, http://www.ibe.org.uk/userfiles/kpmg_india%20report.pdf diakses tanggal 4 Agustus 2017
- Kristian Erdianto, 2018, “Pemerintah Hilangkan Pasal Terkait Korupsi di Sektor Swasta dalam RKUHP”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/15253261/pemerintah-hilangkan-pasal-terkait-korupsi-di-sektor-swasta-dalam-rkuhp> diakses tanggal 8 November 2018
- Kristian Erdianto, 2018, “Pemerintah Usulkan Pasal Korupsi di Sektor Swasta Diatur dalam UU Tipikor”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/16214721/pemerintah-usulkan-pasal-korupsi-di-sektor-swasta-diatur-dalam-uu-tipikor> diakses tanggal 8 November 2018
- Merdeka, “RUU Antikorupsi Yang Baru, Langkah Mundur Upaya Pemberantasan Korupsi”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ruu-antikorupsi-yang-baru-langkah-mundur-upaya-pemberantasan-korupsi-4hedf3l.html> diakses tanggal 20 Mei 2018
- Netherland’s Corruption Report, “The Dutch Penal Code makes it illegal for anyone to give or receive a bribe in the public or private sector, including a foreign public official”, <http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/netherlands> diakses tanggal 2 Desember 2017
- Nurhadi Sucahyo, “Korupsi Sektor Swasta Jadi Tantangan Besar Indonesia”, <https://www.voaindonesia.com/a/korupsi-sektor-swasta-jadi-tantangan-besar-indonesia-/3579400.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2017
- OECD, “The rationale for fighting corruption”, <https://www.oecd.org/cleangovbiz/49693613.pdf> diakses tanggal 4 Agustus 2017

_____, "Glossary of statistical Term: Public Sector",
<https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2199> diakses tanggal 14 Januari 2019

_____, "Glossary of statistical Term: Private Sector",
<https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2130> diakses tanggal 14 Januari 2019

Rizal Bomantama, "Temukan Data Ini, KPK Gandeng Sektor Swasta Cegah Korupsi", <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/13/temukan-data-ini-kpk-gandeng-sektor-swasta-cegah-korupsi> diakses tanggal 25 Desember 2017

Romli Atmasasmita, "Korupsi di Sektor Swasta",
<http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-di-sektor-swasta-0>, diakses tanggal 27 Mei 2017

SAI UGM, "Korupsi : Definisi dan Jenisnya",
http://sai.ugm.ac.id/site/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=25 diakses tanggal 8 Desember 2018

Tempo, "TII: Pemerintah Harus Berantas Juga Korupsi di Sektor Swasta",
<https://nasional.tempo.co/read/839678/tii-pemerintah-harus-berantas-juga-korupsi-di-sektor-swasta> diakses tanggal 10 Oktober 2017

Transparency International, "Engaging The Private Sector In The Fight Against Corruption", https://www.transparency.org/whatwedo/activity/engaging_the_private_sector_in_the_fight_against_corruption, diakses dari tanggal 3 Agustus 2017

Vidya Prahassacita, "Mengadopsi UNCAC Dalam Penyuapan Di Sektor Privat Melalui Non-legislasi", <http://business-law.binus.ac.id/2016/11/29/mengadopsi-uncac-dalam-penyuapan-di-sektor-privat-melalui-non-legislasi/> diakses tanggal 25 Desember 2017

Wendy Robinso, "The Effects of Corruption on Business",
<http://yourbusiness.azcentral.com/effects-corruption-business-15261.html>, diakses tanggal 4 Agustus 2017

Yandi Mohamad, "Kerugian negara akibat korupsi di Indonesia Rp203,9 triliun",
<https://beritagar.id/artikel/berita/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia-rp2039-triliun>, diakses tanggal 26 Mei 2017